

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"  
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

## Konsekuensi Kenaikan Harga Minyak Goreng Dan Larangan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) Di Indonesia

Azzahra Fathia<sup>1</sup>, Wulan Endah Katresna<sup>2</sup>, Hana Salsabila<sup>3</sup>, Novia Wulandari<sup>4</sup>,  
 Nita Nurliawati<sup>5</sup>

Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : <sup>1</sup> 20110182@poltek.stialanbandung.ac.id , <sup>2</sup> 20110205@poltek.stialanbandung.ac.id ,

<sup>3</sup> 20110159@poltek.stialanbandung.ac.id , <sup>4</sup> 20110190@poltek.stialanbandung.ac.id ,

<sup>5</sup> nitanurliawati@poltek.stialanbandung.ac.id

### Abstrak

Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang memiliki peran penting dalam perekonomian di Indonesia. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini tentu saja membuat masalah yang cukup besar bagi masyarakat, Kelangkaan tersebut disebabkan oleh meningkatnya harga CPO dunia yang ikut memicu peningkatan harga CPO domestic dan jumlah persediaan CPO untuk pasar domestic. Tidak hanya itu, Kemendag juga menemukan temuan baru menegnai penyebab kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng di pasaran ini terjadi karena pasokan untuk rakyat justru terserap oleh pihak yang tidak berhak mendapatkannya. Sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar, Indonesia mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan tersebut ialah dengan adanya kebijakan mengenai larangan ekspor CPO hal tersebut dilakukan agar kebutuhan minyak goreng di dalam negeri tercukupi. Larangan ekspor CPO dinilai memberikan dampak yang cukup positif terhadap harga minyak goreng. Metode yang kami gunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan study literature.

**Kata Kunci:** Minyak goreng, larangan ekspor CPO, Indonesia

### *Cooking Oil Price Increase and Crude Palm Oil (CPO) Export Ban in Indonesia*

#### *Abstract*

*Cooking oil is one of the commodities that has an important role in the economy in Indonesia. The scarcity of cooking oil that has occurred recently has certainly created a big problem for the community. The scarcity is caused by the increase in world CPO prices which has also triggered an increase in domestic CPO prices and the amount of CPO supplies for the domestic market. Not only that, the Ministry of Trade also found new findings regarding the cause of the scarcity and rising price of cooking oil in the market because the supply for the people was actually absorbed by parties who were not entitled to it. As one of the largest palm oil producers, Indonesia takes action to overcome this problem, namely by having a policy regarding the ban on CPO exports, this is done so that the domestic demand for cooking oil is fulfilled. The ban on CPO exports is considered to have a fairly positive impact on cooking oil prices. The method we use is a qualitative method with a literature study approach*

**Keywords:** *Cooking oil, CPO export ban, Indonesia*

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

## A. PENDAHULUAN

Minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang dibutuhkan untuk keperluan sehari-hari. Harga minyak goreng akhir akhir ini mengalami kenaikan harga cukup tinggi hal ini disebabkan karena meningkatnya harga *crude palm oil* (CPO) dunia dan berdampak pada konsumen pengguna minyak goreng baik rumah tangga maupun perindustrian. Dan salah satu faktor penyebab lainnya adalah adanya gangguan logistik karena pandemi Covid-19. Untuk mengatasi permasalahan ini Presiden Jokowi melarang ekspor *crude palm oil* (CPO) untuk menjaga ketersediaan minyak goreng dan mengembalikan harga normal.

Menurut Historia.id dalam pemerintahan Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, Indonesia mengalami kelangkaan minyak sebanyak tiga kali saat era Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, dan Presiden Jokowi. Disaat era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kenaikan serta kelangkaan minyak goreng paling lama dan diadakannya penerapan kebijakan larang ekspor *crude palm oil* (CPO).

Dilansir dari cncindonesia, pada tanggal 28 april 2022, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah *crude palm oil* (CPO) dan minyak goreng. Pada 26 April lalu, larangan ekspor berlaku untuk *refined, bleached, deodorized* (RBD) *palm olein* yang merupakan produk turunan minyak sawit mentah sekaligus bahan baku minyak goreng. Kebijakan itu diambil lantaran harga minyak goreng curah di Indonesia masih belum mencapai standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok Kementerian Perdagangan per 25 April 2022, harga rata-rata minyak goreng curah di Indonesia masih di atas Rp17.000 per liter. Kebijakan larangan ekspor diberlakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri terpenuhi. Pasalnya, beberapa waktu lalu ketersediaan produk minyak goreng sempat langka di pasaran yang mana sesuai teori ekonomi, kelangkaan stok memicu kenaikan harga. Oleh karena itu pemerintah mengambil beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dimulai dari

operasi pasar hingga penerapan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan *Domestic Price Obligation* (DPO).

Namun, kebijakan tersebut tidak ampuh untuk mengatasi masalah yang ada. Sehingga pemerintah pun akhirnya melepas harga minyak goreng sesuai harga pasar yang dimana akibatnya harga minyak goreng semakin liar. Untuk mengatasi masalah tersebut, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakn baru yaitu melarang ekspor cpo dan turunannya yang tujuannya agar pasokan *crude palm oil* (CPO) yang ada fokus mengisi kebutuhan pabrik minyak goreng di dalam negeri dulu.

Rafika Sari (2022) dalam penelitian yang berjudul "Dampak Kebijakan Larangan Ekspor *crude palm oil* (CPO) dan Produk Turunan" mendapatkan sebuah pencapaian yaitu bahwa evaluasi terhadap moratorium *crude palm oil* (CPO) menjadi langkah tepat sebagai solusi dalam dampak larangan ekspor *crude palm oil* (CPO). Namun pemerintah tetap harus menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan minyak goreng dalam negeri dalam pengawasan Komisi VI DPR RI terhadap implementasi dan evaluasi kebijakan larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) serta perlindungan petani sawit. Hal-hal tersebut semua didasari pada Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, Permentan No. 01 Tahun 2018 tentang perlindungan petani yang tidak bermitra dengan perusahaan dalam memperoleh harga TBS sawit, dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk mengelola petani yang memiliki pabrik dan pengolahan TBS untuk menjaga harga TBS sawit.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan kebijakan larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) di Indonesia. Penelitian disusun dengan metode kualitatif dengan pendekatan *study literature*.

## B. PEMBAHASAN

Salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yaitu sawit. Badan Pusat Statistik

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

(BPS) mencatat volume ekspor *crude palm oil* CPO pada tahun 2021 mencapai 48% atau sekitar 23,69 juta dari 47,71 juta ton keseluruhan produksinya. Menurut data *The Observatory of Economic Complexity* (OEC) World tahun 2020, Indonesia mengekspor USD17,9 miliar *crude palm oil* (CPO). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pengekspor *crude palm oil* (CPO) terbesar di dunia. Indonesia berperan penting dalam pasar *crude palm oil* (CPO) baik itu sebagai produsen ataupun sebagai eksportir. Meskipun demikian, Indonesia belum mampu menjadi penentu harga (*price setter*) *crude palm oil* (CPO) dunia. Posisi tersebut berada di tangan Malaysia yang menduduki posisi kedua sebagai eksportir *crude palm oil* (CPO) dunia terbesar melalui *Bursa Malaysia Derivatives* (BMD).

Selama periode April 2021-April 2022, harga *crude palm oil* (CPO) dunia mengalami tren peningkatan. Harga *crude palm oil* (CPO) dunia yang tinggi menjadi penarik bagi para pengusaha sawit melakukan ekspor untuk mendapatkan margin keuntungan yang lebih besar. Alih-alih memenuhi kewajiban pasokan *crude palm oil* (CPO) dalam negeri atau *domestic market obligation* (DMO), yang menyebabkan kelangkaan dan mahalnya harga minyak goreng. Petani sawit tentunya mendapat keuntungan yang besar dengan TBS sawit yang tinggi. Menurut penelitian Winardi, dkk (2017) kondisi petani dan pengusaha sawit sebelum adanya kebijakan larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) yaitu saat harga *crude palm oil* (CPO) dunia meningkat Indonesia diuntungkan berperan sebagai pengambil harga (*price taker*). Namun saat harga *crude palm oil* (CPO) dunia rendah, Indonesia harus bisa berperan sebagai *price influencer*.

Melansir dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), Presiden Joko Widodo melarang ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan minyak goreng, dimana *crude palm oil* (CPO) merupakan bahan baku minyak goreng. Larangan berlaku mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Jokowi mengungkapkan alasan pemerintah menerapkan kebijakan larangan ekspor minyak goreng dan (CPO) yaitu demi menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Harapannya, harga minyak goreng bisa lebih terjangkau. Selain itu, adapun dampak

positif lainnya dengan disahkannya kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng, diantaranya sebagai berikut:

1. Melansir [tirto.id](http://tirto.id), Mantan Anggota Komisioner Ombudsman RI periode 2015-2019, Ahmad Alamsyah Saragih, mengatakan kebijakan mengenai pelarangan ekspor minyak sawit mentah dan minyak goreng merupakan langkah ekstrem yang diharapkan dapat mengatasi kelangkaan masif dan peningkatan harga dalam negeri akan minyak goreng. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah setelah melalui banyak langkah yang tak kunjung membuahkan hasil. Berdasarkan data dari sumber yang sama, pemerintah telah menggulirkan beberapa strategi untuk menekan harga hingga mengatasi kelangkaan minyak goreng, diantaranya yaitu:
  - a. Kementerian Perdagangan mencabut Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit. Dalam beleid itu, pemerintah mengatur mengenai HET minyak goreng curah Rp11.500 per liter, kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan kemasan premium Rp14.500 per liter.
  - b. Sementara dalam aturan pengganti, yaitu Permendag Nomor 11 tahun 2022, HET minyak goreng curah ditetapkan Rp14.000 per liter atau naik Rp2.500 per liter dari aturan sebelumnya. Sedangkan untuk harga minyak goreng kemasan premium diserahkan kepada mekanisme pasar.
  - c. Pemerintah bahkan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp300 ribu untuk tiga bulan (April-Juni) kepada masyarakat miskin. Pemberian itu dilakukan sebagai respons menghadapi kenaikan harga minyak goreng akibat meningkatnya minyak sawit di pasar internasional.
2. Kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan minyak goreng dapat mengusut mafia minyak goreng. Melansir dari [antaranews.com](http://antaranews.com), Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam, menyatakan

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

bahwa kebijakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (*crude palm oil*) dan minyak goreng merupakan bentuk negara hadir menjaga kebutuhan rakyat. Negara hadir mendahulukan kepentingan rakyat. Negara hadir melawan kepentingan pengusaha *crude palm oil* (CPO) dan oligarki sawit yang sedang berburu *cuaca* disaat harga melonjak di pasar global. Berdasarkan data dari [cnbcindonesia.com](http://cnbcindonesia.com), beberapa pihak yang terlibat sebagai mafia minyak goreng yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Indrasari Wisnu Wardhana yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Kejagung juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya dalam kasus itu, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia MPT, *Senior Manager Corporate Affair* Permata Hijau Group (PHG) SM, dan *General Manager* di Bagian *General Affair* PT. Musim Mas PTS. Menurut Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah, penetapan itu tidak lepas dari kebijakan Kemendag menetapkan DMO (*Domestic Market Obligation*) dan DPO (*Domestic Price Obligation*) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya. Namun dalam pelaksanaannya, perusahaan eksportir yang tidak memenuhi DPO tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.

Setelah disahkannya kebijakan larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) dan produk turunannya pada tanggal 28 april 2022 menyebabkan beberapa persoalan, sebagai berikut:

1. Seperti yang dilansir pada (Kompas, 18 Mei 2022), kelebihan pasokan *crude palm oil* (CPO) yang selama ini terserap di pasar ekspor tidak mungkin bisa diserap lagi di pasar domestik. Akibat adanya larangan ekspor yang membuat kelebihan *crude palm oil* (CPO) sementara permintaan turun menyebabkan harga tandan buah segar (TBS) sawit menjadi turun. Hal ini membuat banyak pabrik sawit melanggar kesepakatan penetapan harga tandan buah segar (TBS) sawit. Penurunan harga tandan buah segar (TBS) secara sepihak ini membuat kerugian petani yang

diperkirakan mencapai Rp 14 triliun. Besarnya ketergantungan para petani sawit pada nilai-nilai perusahaan menyebabkan petani sawit tidak memiliki kuasa untuk menetapkan harga tandan buah segar (TBS). Oleh karenanya diharapkan kelembagaan petani yang memiliki pabrik sendiri dan mengolah tandan buah segar (TBS) dapat memberikan solusi untuk melindungi kepentingan petani sawit dari fluktuasi harga TBS sawit.

2. Menurut artikel (bisnis.com, 17 Mei 2022), sebagian besar tangki perkebunan di Pulau Sumatera setelah adanya larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) mengalami kondisi dimana para pengusaha sawit melakukan pemberhentian membeli tandan buah segar (TBS) sawit dari petani karena tangki yang mereka miliki di perkebunan olahan *crude palm oil* (CPO) tidak dapat diisi lagi atau penuh akibat dari tidak adanya pembeli. Berhentinya aktivitas pada industri sawit menyebabkan berkurangnya serapan pekerja karena *crude palm oil* (CPO) sendiri merupakan komoditas pertanian yang padat karya (*labor intensive*)
3. Larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) di Indonesia mengakibatkan beralihnya permintaan *crude palm oil* (CPO) ke negara kompetitor. Menurut (OEC World, 2020), untuk *competitor* Indonesia dalam pasar *crude palm oil* (CPO) dunia yaitu Malaysia, yang dimana menduduki posisi terbesar kedua dunia dalam pengekspor *crude palm oil* (CPO) dengan kontribusinya kurang lebih 26% dari nilai ekspor (*crude palm oil*) CPO dunia pada tahun 2020. Jika dibandingkan dengan Indonesia, Malaysia hanya mencapai 60% dari nilai ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia dan akan meraup keuntungan yang besar jika keran ekspor *crude palm oil* (CPO) Indonesia ditutup.
4. Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies Bhima Yudhistira yang dilansir pada (CNBC Indonesia, 29 April 2022) mengatakan dampak dari larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) ini yaitu pengusaha sawit yang kehilangan pendapatan dari ekspor *crude palm oil* (CPO) akan mengompensasikan kerugian margin harga

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

produk turunan, termasuk minyak goreng. Dengan begitu minyak goreng kemasan yang menggunakan mekanisme pasar akan semakin mahal. Melihat dari data neraca dagang per Maret 2022, yang dimana nilai ekspor *crude palm oil* (CPO) mencapai US\$3 Miliar atau setara dengan Rp43 triliun/bulan dan jika larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) dilakukan selama sebulan penuh mengakibatkan nilai ekspor sebesar dalam data neraca dagang akan menghilang. Hal tersebut juga akan merimbas pada pelemahan nilai tukar rupiah yang dimana bawha sekitar 12% dari tital ekpor nonmiga nasional berasal dari pengapalan *crude palm oil* (CPO). Selanjutnya devisa yang hilang akan mengalir ke pemain minyak nabati pesaing Indonesia seperti Malaysia yang akan menerima limpahan permintaan.

5. Larangan ekspor *crude palm oil* (CPO) juga berdampak harga di pasar dunia akan semakin tinggi. Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda yang dilansir dalam (BeritaSatu.com, 23 April 2022) mengatakan bahwa akibat dari kurangnya pasokan dari Indonesia mengakibatkan harga di pasar dunia semakin tinggi. Kondisi ini akan menguntungkan negara pesaing Indonesia dan juga berpotensi menimbulkan perdagangan ilegal.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Berdasarkan berbagai penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan mengenai ekspor minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak goreng merupakan langkah besar yang diambil Pemerintah untuk mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng yang belakangan ini terjadi. Hal itu memperlihatkan adanya paradoks dimana Indonesia sebagai salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan total luas lahan lebih dari 15 juta hektar akan tetapi harga minyak goreng dalam negeri mengalami kenaikan yang relatif tidak terkendali.

Terkait hal ini, Pemerintah harus melakukan pembenahan tata niaga sawit yang dengan melewati beberapa strategi, diantaranya: (1)

pelaksanaan penetapan tandan buah segar (TBS) sawit dan pemberian sanksi/ peringatkan tegas terhadap perusahaan yang melanggar penetapan harga harus diawasi dengan ketat; (2) memberikan perlindungan bagi petani yang tidak bermitra dengan perusahaan dalam memperoleh harga tandan buah segar (TBS) sawit; (3) Pemerintah harus mendukung penuh hadirnya petani yang telah memiliki pabrik dan melakukan pengolahan TBS untuk menjaga harga tandan buah segar (TBS) sawit tersebut. Namun akibat dari larangan ekspor minyak sawit mentah atau *Crude Palm Oil* (CPO) dan minyak goreng Indonesia harus rela kehilangan devisa negara yang cukup besar, mengingat sawit merupakan salah satu ekspor unggulan yang memberikan kontribusi devisa negara nonmigas yang utama.

### REFERENSI

- Asmara, C. G. (2022, April 22). Ini Alasan Jokowi Resmi Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220422174108-4-334114/ini-alasan-jokowi-resmi-larang-ekspor-minyak-goreng-dan-cpo>
- DPR RI: Larangan ekspor bahan baku minyak goreng bukti negara hadir. Retrieved from Antara News Com: <https://www.antaraneews.com/berita/2838673/dpr-ri-larangan-ekspor-bahan-baku-minyak-goreng-bukti-negara-hadir>
- D.A. (2022, April 26). Mengkaji Dampak Kebijakan Larangan Ekspor CPO & Minyak Goreng. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengkaji-dampak-kebijakan-larangan-ekspor-cpo-minyak-goreng-grxj>
- Dewi, I. R. (2022, Mei 7). Ambyar! Segini Kerugian RI Akibat Ulah Mafia Minyak Goreng. Retrieved from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20220507075913-17-337055/ambyar-segini-kerugian-ri-akibat-ulah-mafia-minyak-goreng>

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022  
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth  
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

- Handayani, N. A. (2022, April 23). Apa Dampak Larangan Ekspor Minyak Goreng yang Diberlakukan Jokowi? Retrieved from suara.com:  
<https://www.suara.com/news/2022/04/23/161305/apa-dampak-larangan-ekspor-minyak-goreng-yang-diberlakukan-jokowi?page=all>
- Herman. (2022, April 23). *Pelarangan Ekspor CPO dan Migor Punya Efek Domino*. Diambil kembali dari Investor.id:  
<https://investor.id/business/291642/pelarangan-ekspor-cpo-dan-migor-punya-efek-domino>
- Pratama, W. P. (2022, April 26). *Kronologi Larangan Ekspor Sawit, Ternyata Bukan untuk CPO!* Diambil kembali dari Bisnis.com:  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220426/9/1527439/kronologi-larangan-ekspor-sawit-ternyata-bukan-untuk-cpo>
- Rahadian, L. (2022, April 29). *Ini Kerugian dan Dampak Negatif Larangan Ekspor CPO Bagi RI*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia:  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220429095448-4-335990/ini-kerugian-dan-dampak-negatif-larangan-ekspor-cpo-bagi-ri>
- Sari, R. (2022). DAMPAK KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR CPO DAN PRODUK TURUNAN. KAJIAN SINGKAT TERHADAP ISU AKTUAL DAN STRATEGIS, 19.
- Setiawan, V. N. (2022, April 23). *Jokowi Resmi Larang Ekspor Minyak Goreng & CPO, Ini Alasannya*. Diambil kembali dari CNBC Indonesia:  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20220423071627-4-334162/jokowi-resmi-larang-ekspor-minyak-goreng-cpo-ini-alasannya>
- Winantu Pangaribowo\*, I. T. (2021). DAMPAK KEBIJAKAN BIODIESEL 20 TERHADAP DAYA SAING EKSPOR MINYAK SAWIT MURNI (CPO) INDONESIA. *Berkala Ilmiah Agribisnis*